

POLITIK DIPLOMASI PERDANA MENTERI AMIR SYARIFUDIN
DAN PERJANJIAN RENVILLE

Ervani¹, Sumiyatun², Kuswono³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: ervanipanjol@gmail.com

ABSTRACT

In the early days of Indonesian independence, the Netherlands was a country that did not want to recognize Indonesia's de facto independence. Under Prime Minister Amir Syarifudin, Indonesia carried out political diplomacy with the Netherlands. Amir Syarifudin chose diplomacy because he saw that the Dutch fighting strength was much better than Indonesia at that time and so that there would be no more bloodshed. The purpose of writing this article is to find out how Indonesia's diplomacy politics during the revolution under Prime Minister Amir Syarifudin was an effort to defend Indonesia's independence. In this study, the author uses the historical method with data collection techniques using relevant literature studies. The results showed that the diplomacy chosen by Prime Minister Amir Syarifudin was still not able to satisfy the Indonesian people. The conclusion of this research is that Amir Syarifudin's diplomacy caused great disappointment and brought down Amir Syarifudin's cabinet.

Keywords: Politics; Diplomacy; Amir Syarifudin

PENDAHULUAN

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing khususnya Belanda yang masih ingin kembali menguasai wilayah Indonesia seperti masa dulu. Pemerintah berupaya menghalau ancaman-ancaman dari Belanda yang kembali ingin menguasai wilayah Indonesia. Kekuatan Belanda yang sangat kuat pada masa itu, terus mendesak pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kekuasaan Negara kepada Belanda. Namun pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Amir Syarifudin terus berupaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melihat kondisi bangsa Indonesia, dan tentara yang belum cukup kuat, Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri Indonesia mengambil jalan diplomasi demi untuk menghalau adanya pertempuran dan pertumpahan darah. Politik diplomasi adalah jalan yang dianggap baik pada masa itu. Diplomasi ini dikenal sebagai perjanjian Renville.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik diplomasi Indonesia pada masa revolusi dibawah Perdana Menteri Amir Syarifudin sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca kedepannya. Sumber rujukan adalah dari Skripsi (Ervani,2020). Untuk mengetahui bagaimana politik diplomasi Amir Syarifudin dan perjanjian Renville, maka penulis juga mengumpulkan literature dari beberapa sumber buku agar lebih relevan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian atau penulisan sejarah, memang sangat diperlukan suatu metode agar

Politik Diplomasi Perdana Menteri Amir Syarifuddin... , Ervani, Sumiyatun, Kuswono 21-29
efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis. Menurut Gilbert J. Garragan yang dikutip dari (Daliman, 2012: 27) menjelaskan bahwa :

“Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis”.

Dari pernyataan tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa metode sejarah adalah suatu langkah atau tahapan dalam penelitian sejarah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mempermudah peneliti untuk menguji dan menganalisis secara kritis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk mendapat data yang bersifat fakta dan dapat di percaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode historis dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti menganalisa data-data dari berbagai sumber mengenai materi yang akan dikaji.

Peneliti melakukan pengumpulan data-data dari sumber-sumber sejarah dengan harapannya peneliti dapat memperoleh data fakta dan akurat. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku sumber sejarah atau dokumen-dokumen yang terdapat dimana saja. Heuristik merupakan kegiatan awal seorang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian sejarah. Heuristik merupakan kegiatan awal seorang peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber data sejarah yang akan dikaji. Menurut Daliman (2012: 55) menjelaskan bahwa:

“Sumber sejarah sekunder disampaikan bukan oleh orang yang menyaksikan sendiri atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Penulis sumber sekunder bukanlah orang yang hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa”

Maka dapat diambil pengertian bahwa sumber sejarah sekunder bukanlah data yang diperoleh dari saksi sejarah ataupun pelaku sejarah, melainkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh dari buku-buku referensi, ensiklopedia atau kamus sejarah yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian penulis juga melakukan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, tulisan laporan penelitian ilmiah, dan sumber-sumber cetak maupun sumber-sumber elektronik. Data yang diperoleh kemudian dibaca, dicermati, dianalisis dan dikembangkan lagi yang akan digunakan sebagai bahan data dalam sebuah penelitian (Daliman, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalan perjuangan bangsa Indonesia melalui politik diplomasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda yang berupaya merebut kembali wilayah

Indonesia. Amir Syarifudin yang merupakan Perdana Menteri Indonesia pada saat itu memilih jalan diplomasi bukan tanpa alasan. Diplomasi dipilih karena mengingat keadaan pertahanan Negara belum cukup kuat untuk melawan tentara Belanda yang dilengkapi persenjataan yang sangat baik. Kemudian, diplomasi ini dilakukan agar tidak terjadi perang dan pertumpahan darah.

Perjanjian Renville diawali dengan pengangkatan Amir Syarifudin yang menggantikan kabinet Sjahrir. Presiden Soekarno memberikan mandate kepada Amir Syarifudin untuk membentuk kabinet baru sebagai pengganti kabinet Sjahrir. Amir Syarifudin berhasil membentuk kabinet baru pada tanggal 3 Juli 1947. Pembentukan kabinet Amir ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan Belanda yang terus melancarkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia. Keadaan negara yang masih lemah dan dengan adanya serangan Belanda secara terus-menerus, tentu pemerintah harus bertindak cepat untuk menangani masalah ini. Amir yang duduk sebagai Perdana Menteri mengambil jalan diplomasi sebagai langkah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jalannya diplomasi antara Indonesia dengan Belanda dibantu oleh PBB sebagai penengah.

Sementara itu sebagai akibat campur tangan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia mencapai persetujuan gencatan senjata. Presiden Soekarno menginstruksikan penghentian tembakan-menembak pada tanggal 4 Agustus dan pasukan Indonesia bertahan pada posisi. 4 Agustus pukul 24:00 tetapi walaupun demikian pertempuran-pertempuran masih berlangsung terus. Sebagai hasil perang kolonial I, RI kehilangan daerah-daerahnya yang terbaik, menerima 700.000 pengungsi dan suasana psikologis yang buruk. PBB kemudian campur tangan lagi dan membentuk sebuah Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Belgia, Australia, dan Amerika Serikat sebagai wakil PBB. KTN inilah yang meratakan perundingan-perundingan Lanjutan RI dan Belanda (Gie, 2017).

Perundingan lanjutan ini adalah sebagai lanjutan dari Perjanjian Linggarjati yang dilakukan Kabinet Sjahrir. Amir memilih jalan diplomasi karena melihat situasi pemerintahan yang lemah dan tentara yang ada masih belum cukup kuat untuk melawan serangan Belanda. Jalan diplomasi dianggap benar karena untuk mengurangi resiko terjadinya pertumpahan darah. Kehilangan beberapa daerah yang telah diduduki oleh Belanda juga membuat rakyat dan pemerintah Indonesia menjadi tertekan.

Mengingat serangan-serangan Belanda yang datang bertubi-tubi, dan demi keamanan dalam jalannya perundingan itu, Amir meminta kepada KTN dibawah Dewan Keamanan PBB untuk menyiapkan tempat perundingan demi keamanan delegasi. Seperti yang telah di jelaskan;

“Mengenai tempat perundingan Perdana Menteri Amir meminta agar jangan diadakan pada suatu tempat yang dikuasai Belanda, tetapi di luar Indonesia, diluar daerah pertikaian Indonesia-Belanda. Perdana Menteri Amir juga meminta agar Komisi Konsul segera memulai tugasnya dan Indonesia akan memberikan segala fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut” (Wellem, 2017).

Dapat dipahami bahwa Amir benar-benar memperhitungkan segala sesuatunya demi keamanan terkait perundingan yang akan di laksanakan. Meskipun dengan bantuan dari KTN, yang dari awal sebagai jembatan untuk penyelesaian masalah sengketa antara Indonesia dan Belanda, Amir

Politik Diplomasi Perdana Menteri Amir Syarifuddin... , Ervani, Sumiyatun, Kuswono 21-29 sebagai Perdan Menteri tetap waspada akan hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan pihak Indonesia. Atas usulan KTN, kedua belah pihak setuju mengadakan perundingan di atas kapal laut yang berlabuh diluar zona tiga mil dan dianggap sebagai tempat netral. Kapal yang digunakan ialah USS Renville milik Amerika Serikat. (Daud, 2012)

Perundingan resmi dibawah pengawasan KTN dimulai pada 8 Desember 1947. Delegasi RI diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dengan Alisastroamidjojo sebagai wakil ketua. Anggota delegasi adalah Dr. Tjoa Sik Ien, H. Agus Salim, Mr. Moh. Roem, Mr. Nasrun, Ir. Djuanda, dan Drs. Setiajit. Selain itu diperbantukan pula beberapa orang penasihat, sekretaris dan perwira penghubung. Mereka antara lain Dr. J. Leimana dan Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Delegasi Belanda berjumlah 13 Orang ditambag dengan 2 sekretaris. Tujuh orang diantaranya adalah orang-orang Indonesia yang pro-Belanda.mereka adalah Abdulkadir Widjoatmodjo yang diangkat sebagai ketua, sedangkan anggotanya ialah Mr. Dr. Ch. Somoukil (menteri kehakiman NIT), Mr. Tengku Dzulkarnain (anggota Dewan Sementara Sumatera Timur), Adji Pangeran Kartanegara (ketua Dewan Swapraja Kalimantan Timur), Masjarif Gelar Lelo Bendahara (ketua Dewan Bangka), Thoi Thian Tjong (penasehat van Mook), dan J. Tahija (wakil NIT di Batavia).

Dalam perundingan ini diawali dengan pidato pembukaan masing-masing perwakilan delegasi. Amir yang duduk sebagai ketua delegasi Indonesia menyampaikan pidatonya dengan optimis. Amir meyakini bahwa perundingan ini akan menentukan nasib negara di masa mendatang. Pilihan untuk melakukan perundingan juga didukung oleh rakyat Indonesia. Amir yang terkenal sebagai seorang orator, dan organisator ulung memimpin delegasi dengan semangat kebangsaan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang belum di akui oleh Belanda.

Wellem (2009:172) pada pembukaan ini Perdana Menteri Amir Syarifudin mengucapkan pidatonya yang menyatakan bahwa ia gembira karena sekarang telah terbuka kesempatan untuk menyelesaikan soal pertikaian Indonesia-Belanda.

Namun ia sesalkan bahwa kesempatan ini baru terbuka setelah meminta banyak korban nyawa manusia, harta benda lainnya. Amir merasa optimis bahwa perundingan ini akan mencapai hasil yang memuaskan karena di hadiri oleh wakil- wakil Dewan Keamanan PBB sendiri. Di sini nampak bahwa Amir Syarifudin memang menaruh harapan besar dengan diadakannya perundinga dengan pihak Belanda atau yang di kenal dengan Perjanjian Renville. Amir memiliki pandangan bahwa perundingan ini akan mencapai tujuan perdamaian bagi kedua belah pihak baik Indonesia maupun Belanda. Namun secara tidak langsung Amir menyangkan adanya kontak senjata akibat serangan belanda ke daerah-daerah yang menyebabkan banyaknya korban jiwa akibat pertempuran. Dengan dihadiri oleh Dewan Keamanan PBB yang berposisi sebagai lembaga yang menjembatani pertikaian ini, Amir menjadi lebih yakin bahwa pertikaian ini akan selesai. Namun berjalannya perundingan ini menjadi semakin alot karena dari pihak Indonesia dan Belanda memiliki pandangan dan keyakinan yang beseberangan tentang persengketaan tersebut.

Gie (2017:140-141) Belanda berusaha agar garis "van Mook" diakui oleh RI sedangkan pihak

Indonesia meminta agar tentara Belanda ditarik ke kedudukan semula sebelum Belanda menyerbu. Soal lain yang menjadi pertikaian adalah persoalan pembentukan RIS di kemudian hari. Dalam ide Belanda, RI adalah salah satu negara bagian yang lain (negara Sumatera Timur-NIT, Negara Pasundan, dan lain-lain), padahal dalam persetujuan Linggajati dinyatakan bahwa RI dan Belanda bersama-sama membentuk RIS. Belanda dalam perundingan-perundingan tadi mengatakan secara halus bahwa jika perundingan ini gagal maka konsekuensinya adalah perang lagi. Dan jika RI menolak usulan Belanda maka Amerika Serikat tidak akan membantu RI sehingga RI akan sendirian.

Dari sini Nampak sekali bahwa sengketa antara Indonesia dan Belanda sulit untuk di selesaikan. Bagi pemerintah Indonesia, wilayah-wilayah yang di duduki Belanda adalah jelas wilayah NKRI. Amir sebagai perdana menteri yang mengetuai delegasi Indonesia dalam perundingan, bersikeras tetap dalam pendiriannya untuk mempertahankan wilayah dan kemerdekaan Indonesia. Amir sebagai ketua delegasi Indonesia tentu menolak tuntutan Belanda. Begitupun Belanda yang menolak tuntutan Indonesia.

Namun melihat kenyataan yang ada bahwa Belanda menguasai sebagian daerah, ditambah dengan serangan Belanda yang bertubi-tubi membuat pemerintah Indonesia berada dalam posisi lemah dan terjepit. Disisi lain, pihak Belanda tetap dalam keyakinannya bahwa wilayah yang telah mereka duduki adalah wilayah Belanda. Garis daerah yang di inginkan Belanda adalah garis yang lebih luas pada daerah-daerah yang mereka kuasai setelah penyerangan. Garis van Mook, atau yang lebih di kenal dengan garis demarkasi adalah garis atau batas antara kedaulatan RI dan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Tanudirjo (2012:252) Istilah demarkasi, baik bagi orang republiken maupun Belanda, dipahami sebagai daerah perbatasan antara dua wilayah kekuasaan politik berbeda. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia pasca-Proklamasi, ide tentang demarkasi merupakan sebuah kesadaran baru di kalangan kaum nasionalis tentang wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah merupakan representasi nyata dari tanah air Indonesia, bumi tempat berpijak dan sekaligus alat identifikasi bersama tentang eksistensi atau keberadaan suatu negara-bangsa yang berdaulat atas wilayah dan penduduknya. Dalam semangat revolusi, setiap jengkal wilayah harus dipertahankan dari upaya penguasaan musuh, yakni Belanda dan kaki tangannya.

Garis-garis wilayah kedaulatan RI adalah pokok utama yang di perjuangkan oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifudin. Amir yang duduk sebagai ketua delegasi dan sebagai perdana menteri Indonesia tentu sangat keras memperjuangkan wilayah Indonesia yang di duduki Belanda. Sebaliknya, Belanda juga mencoba mempertahankan kekuasaannya atas wilayah yang di akui sebagai wilayah Belanda setelah agresi militer. Nampaknya perundingan ini menemui jalan buntu. Perundingan sempat di tunda karena belum adanya jalan keluar yang disebabkan keinginan Indonesia dan Belanda sangat berlawanan. Belanda menuntut agar gencatan senjata diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembicaraan politik dimulai. Delegasi RI menolak tuntutan delegasi Belanda. Mereka meninggalkan kapal Renville dan kembali ke Yogya. (Tanudirjo, 2012:375).

Wellem (2009:178) sementara itu Belanda giat mengadakan persiapan untuk membentuk Negara Jawa Barat, Negara Jawa Timur, dan Negara Sumatera Timur. Tindakan Belanda ini merupakan suatu pelanggaran yang nyata-nyata di depan KTN karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah RI yang direbut oleh Belanda. Mulai terdengar desas-desus bahwa Belanda akan menyerang Yogyakarta jikalau 12 prinsip politik Belanda ditolak oleh Republik. Terlihat jelas bahwa dalam waktu melakukan perundingan, Belanda melakukan kecurangan dengan tetap melancarkan strategi untuk menguasai kembali Indonesia. Belanda seperti mengabaikan KTN yang jelas-jelas adalah lembaga bentukan PBB sebagai alat untuk menjembatani persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Dengan kekuatannya, Belanda terus melakukan serangan dan ultimatum. Seperti yang telah dijelaskan Wellem (2009:176) :

“tiba-tiba tanggal 9 Januari, Belanda memberikan ultimatum bahwa RI harus menerima tuntutan Belanda secara mutlak dalam tempo tiga hari. Jikalau batas waktu ultimatum selesai maka delegasi Belanda akan meminta instruksi baru dari Den Haag. Hal ini sangat mencemaskan KTN. Ultimatum ini berarti bahwa jika RI tetap menolak maka Belanda akan menjalankan kekerasan dan berarti pula peperangan akan berkobar lagi”.

Disini dapat terlihat bahwa Belanda memang benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai negara yang kuat untuk menguasai Indonesia. Hal ini menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Indonesia. Mengingat pertahanan negara Indonesia masih sangat lemah. Dan untuk mengantisipasi ancaman Belanda tersebut, maka Amir sebagai perdana menteri terus mendiskusikan masalah ini dengan tokoh-tokoh lainnya yang disebut Lima Besar RI. Oleh karena itu maka Amir sendiri terbang ke Singapura untuk mengambil Sjahrir dan kemudian ke Pekanbaru untuk mengambil Hatta. “Lima Besar RI” yang dimaksud adalah Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Syarifudin dan H. Agus Salim. (Wellem, 2009-176).

Melihat situasi negara yang terjepit, Amir sebagai Perdana Menteri Indonesia melakukan diskusi-diskusi dengan para tokoh-tokoh pendiri bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Walaupun memegang mandat untuk menyelesaikan perundingan dengan Belanda, Amir tetap melakukan mediasi dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa tersebut. Hal ini Amir lakukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Disisi lain, walaupun Amir duduk dalam kursi perdana menteri, ia tetap menghargai tokoh-tokoh pendiri bangsa tersebut. Namun dengan adanya tekanan dari pihak Belanda secara terus menerus Amir mengambil keputusan untuk menandatangani perundingan dengan Belanda.

Yema (2013:53) akhirnya pada 17 Januari 1948, perjanjian Renville ditandatangani. Dalam perjanjian itu, wilayah kekuasaan Indonesia dinyatakan menjadi lebih sempit hanya meliputi Jawa Tengah, ujung barat Jawa, dan Banten. Perjanjian Renville terdiri atas 10 pasal gencatan senjata, 12 prinsip politik, 6 pasal tambahan dari prinsip dari KTN yang secara langsung menuai reaksi keras di kalangan Republik Indonesia.

Amir sebagai ketua delegasi yang di beri mandat oleh Presiden Soekarno seperti tidak ada pilihan selain menandatangani perundingan tersebut. Walaupun delegasi Indonesia telah

mengajukan tuntutan-tuntutan dalam perundingan, tidak terrealisasi karena Belanda terus melakukan serangan-serangan dan ultimatum kepada pemerintah Indonesia. KTN yang dibentuk PBB pun tidak dapat berbuat banyak. Hasil dari Perjanjian Renville dianggap merugikan pihak Indonesia oleh orang-orang Republik. Kecaman-kecaman dari kalangan Republik Indonesia kepada Amir sebagai ketua delegasi datang bertubi-tubi. Hingga Akhirnya Amir mengundurkan diri dari kursi pemerintahan dan mengembalikan mandat perdana menteri kepada Presiden Soekarno.

Setelah Perjanjian Renville, banyak terjadi kekecewaan dari kalangan Republik Indonesia. Kecaman-kecaman di lontarkan kepada Perdana Menteri Amir yang dianggap gagal karena merugikan pihak Indonesia dalam Perjanjian Renville. Banyak kalangan yang semula mendukung Amir, berubah pikiran dan menarik dukungannya. Amir sadar bahwa ia tidak dapat berbuat banyak dalam Perjanjian Renville tersebut. Namun kekecewaan dari kalangan Republik yang terus-menerus melontarkan kecaman membuat Amir semakin tertekan. Dalam masa-masa Amir menjabat sebagai perdana menteri, Amir terus merasa tertekan. Diawali dari pihak Belanda yang melakukan propaganda kepada pihak Indonesia yang berarti juga dirasakan oleh Amir karena ia adalah Perdana Menteri dan akhirnya tekanan datang dari kalangan Republik sendiri yang menarik dukungan karena kekecewaan akibat Perjanjian Renville.

Tanudirjo (2012:378) persetujuan Renville mengakibatkan terjadinya perpecahan politik dalam negeri. Masyumi dan PNI, dua partai besar pendukung Amir Syarifudin, menarik menteri-menteri mereka dari kabinet. Menteri-menteri yang mewakili Masyumi mengundurkan diri pada 16 Januari 1948. Sehari sebelum persetujuan Renville ditandatangani, sedangkan menteri-menteri yang mewakili PNI mengundurkan diri pada 18 Januari 1948, sehari sesudah persetujuan. Bahkan Ali Sastroamidjojo (PNI), yang juga menjadi wakil ketua delegasi RI, menolak untuk menandatangani persetujuan itu. Akibat ditinggalkan oleh dua partai besar itu, Kabinet Amir Syarifudin goyah. Pada 23 Januari 1948, Amir Syarifudin mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Terlihat bahwa Perjanjian Renville tidak hanya membawa Negara Indonesia kepada situasi yang sulit karena penyempitan wilayah, namun juga membawa perpecahan di dalam tubuh pemerintahan. Masyumi dan PNI yang awalnya menjadi pendukung kuat kabinet Amir Syarifudin, menarik dukungannya dari kabinet. Hal ini karena mereka merasa kecewa dengan hasil Perjanjian Renville. Sebenarnya kekecewaan juga dirasakan oleh Amir Syarifudin sendiri karena merasa dihianati oleh para pendukung kabinetnya. Jelas itu menjadi alasan kenapa Amir mengembalikan mandat sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno.

Gie (2017:183) Jatuhnya kabinet Amir tidaklah terlalu mengejutkan. Sebelum kabinet jatuh "pengamat politik" sudah mulai aktif untuk mencari-cari siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri yang baru, karena menyadari bahwa Amir tidak dapat bertahan lama. Salah seorang yang di dekati adalah Hatta. Ketika ia pulang dari Sumatera, Sjahrir, Dr. Leimena, dan beberapa tokoh lainnya datang padanya dan menyatakan bahwa hanya dialah yang dapat menyelamatkan keadaan dan diminta kesediannya untuk menjadi calon Perdana Menteri, Hatta setuju dengan syarat bahwa PNI

Politik Diplomasi Perdana Menteri Amir Syarifuddin..., *Ervani*, Sumiyatun, Kuswono 21-29 dan Masyumi mendukungnya. Di luar, Hatta disebut-sebut calon orang kuat sebelum Amir meletakkan jabatan, dan dari sini terlihat bahwa Amir dijatuhkan oleh rekan-rekannya sendiri.

Pada masa revolusi, terjadi pergolakan politik yang sangat serius khususnya dalam kursi pemerintahan. Dukungan terjadi apabila memiliki pandangan yang sama. Begitupun sebaliknya, jatuh menjatuhkan menjadi isu-isu yang umum dan wajar. Kursi pemerintahan menjadi penting bagi golongan yang memiliki pandangan yang sama. Walaupun nasionalisme ada dalam pribadi masing-masing, namun kekuasaan dalam pemerintahan menjadi tujuan bagi partai-partai. Terlepas dari kepentingan pribadi, orang-orang republik tetap dalam jalur perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitupun yang dilakukan Amir Syarifudin, walaupun ia tidak lagi duduk dalam kursi pemerintahan, Amir tetap dalam dunia politik dengan Partai Sosialis bersama pengikutnya.

PENUTUP

Simpulan

Jalan diplomasi yang dipilih Perdana Menteri Amir Syarifudin demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertimbangan yang matang dan dengan melihat situasi Negara ternyata masih kurang dapat memuaskan rakyat Indonesia khususnya orang-orang yang ada dalam kursi pemerintahan itu sendiri. Dapat dipahami situasi itu dipengaruhi oleh gejolak politik dalam negeri yang begitu sengit. Perebutan kursi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang mendorong perpecahan dalam pemerintahan itu sendiri. Ditambah lagi pihak asing yaitu Belanda yang terus melakukan ultimatum kepada pemerintah Indonesia demi untuk mengambil alih kekuasaan memperburuk situasi dalam negeri. Hasil dari perjanjian Renville menyebabkan kekecewaan yang besar hingga menjatuhkan kabinet Amir Syarifudin.

Saran

Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya kita lebih peduli lagi dengan masalah kebangsaan saat ini, agar berguna bagi bangsa untuk kedepannya. Peneliti ini terbatas pada sumber buku, dimana buku-buku yang ada di perpustakaan masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti menyarankan supaya pembaca yang akan menulis artikel dengan topik yang serupa dapat menambah referensi agar kedepannya menjadi tulisan yang lebih baik dan menambah pengetahuan sejarah Indonesia bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Daliman. 2012. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta : Ombak
Frederick D. Wellem, 2010. Amir Sjarifoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan

Purba Yema Siska, 2013. Amir Syarifudin: Nasionalis yang Tersisih, Yogyakarta : PolGov

Soe Hok Gie, 2017. Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yogyakarta: Mata Bangsa

Tanudirjo Daud Aris, 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi,

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.